

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan kawasan konservasi ataupun pembangunan infrastruktur, khususnya waduk sering kali mengalami perlawanan dari masyarakat. Masyarakat yang berhadapan dengan pengusiran biasanya punya pandangan jelas tentang apa yang mereka tolak, yakni hilangnya komunitas dan sumber kehidupan. Pengusiran di satu lokasi bisa menyatukan perlawan lintas kelas dan suku karena bentuk eksklusi ini bersifat langsung dan menghancurkan, dan ribuan orang secara bersamaan terancam oleh satu sumber ancaman. Perlawanan terhadap pengusiran dapat meluas dengan cepat ketika wacana legitimasi yang digunakan mendapatkan sambutan dan dukungan dari gerakan masyarakat adat, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Perlawan itu semakin menggema bila disuarakan oleh jaringan aktivis mahasiswa, ORNOP, dan lembaga-lembaga donor yang menghubungkan kasus-kasus di tingkat lokal dan masalah di tingkat global. Seringkali, mobilisasi diperkuat oleh amarah karena menyaksikan kekerasan fisik dalam proyek-proyek pembangunan skala besar yang juga dipenuhi dengan kepentingan sebagian orang (Hall *et al*, 2020).

Eksklusi sosial bukanlah hal baru yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus pembangunan infrastruktur, masyarakat sekitar lokasi pembangunan sering terjadi konflik sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan tanah dan sumber daya kehidupan serta beberapa masalah lainnya. Sehingga yang terjadi adalah penolakan pembangunan oleh masyarakat setempat. Penolakan yang terjadi berupa Perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini pembangunan infrastruktur, khususnya bendungan ataupun waduk.

Di Filipina, perlawanan terhadap waduk sungai Chico pada 1970-an memainkan peran sepola. Namun, kampanye meluas protes anti waduk yang paling berhasil terjadi di Thailand, dimana rangkaian mobilisasi lokal yang diprovokasi terutama oleh pengusiran pada 1995 terajut dengan gerakan nasional rakyat yang senasib sama sebagai “korban pembangunan”. Gerakan tersebut menamai diri Dewan Rakyat Miskin (DRM), satu nama yang menggambarkan struktur organisasinya (sebuah majelis atau forum yang setara) dan memberikan pesan kuat tentang jurang si kaya dan si miskin dalam masyarakat Thailand (Missingham 2003:44; Baker 2000:16). Di Indonesia, perlawanan terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo pada pertengahan pertengahan 1980-an membangun kembali jembatan antara aktivis kota dengan gerakan petani yang telah putus sejak pembunuhan masal 1965 (Aditjondro,1998). Ketidakpuasan timbul dari masyarakat karena pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah akibat hilangnya sumber-sumber pendapatan

dan ruang hidup warga. Karena itulah, masyarakat melakukan resistensi terhadap suatu kebijakan pembangunan.

Dengan cara yang sama, rencana pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo dimulai pada tahun 1999-2000, ketika Nagekeo masih menjadi bagian dari Kabupaten Ngada. Pada tahun 2001-2002, pemerintah Kabupaten Ngada melakukan sosialisasi dan survei tentang rencana pembangunan bendungan (waduk), yang saat itu dikenal sebagai waduk Mbay. Namun, masyarakat terdampak menentang rencana ini dan menghentikannya pada tahun 2004. Rencana pembangunan ini mengalami konflik horizontal dan vertikal seiring berjalannya waktu. Setelah program pembangunan waduk berakhir, program tersebut dimasukkan ke dalam Nawacita Pembangunan 64 bendungan di tahun 2015. Rencana pembangunan waduk Lambo tahun 2015 adalah lanjutan dari rencana pembangunan tahun 2002 yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dataran Mbay menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia, tetapi sempat terhenti karena penolakan masyarakat saat itu. Ini adalah tujuan dari rencana pembangunan waduk tahun 2002. Area yang direncanakan untuk genangan air waduk Lambo adalah 431,92 hektar.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air di wilayah yang mengalami kekeringan parah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya meningkatkan fasilitas penyediaan air. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan tujuh bendungan/waduk antara tahun 2015 hingga 2019 melalui Balai

Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II. Terdapat tiga bendungan di Pulau Timor; Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin dan Kolhua. Terdapat tiga bendungan lain di Flores: bendungan Napung Gete, Temehu, dan Waduk Mbay. Setiap reservoir berada pada tahap pembangunan yang berbeda. bendungan Raknamo di Kota Kupang sudah beroperasi. Tiga waduk yang sudah memasuki tahap pembangunan adalah di Rotikrot, Napung Gete, dan Temehu. Pada tahap perencanaan dan persiapan, pemerintah akan fokus pada bendungan Manekin, Kolhua dan Lambo. (sumber:<http://setkab.go.id/bangun-7-waduk-di-ntt-jokowi-hari-ini-resmikan-waduk-raknamo/>).

Pada tanggal 23 Juni 2015 Pembangunan waduk Lambo Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mengusulkan pembangunan kembali kepada Pemerintah Pusat. Pengusulan pembangunan waduk ini bertujuan untuk (a) pemenuhan kebutuhan air baku di sebagian Kecamatan Aesesa Selatan dan Perkotaan Mbay, (b) penyediaan air bagi irigasi pertanian, dan (c) untuk sarana Pembangkit Listrik Tenaga Air. Akan tetapi, masyarakat adat yang menempati tanah ulayat yang menjadi dampak pembangunan waduk antara lain; Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam 3 desa yakni desa Rendu Butowe, kecamatan Aesesa Selatan, desa Labolewa, kecamatan Aesesa dan desa Ulupulu, kecamatan Nangaroro tetap menolak rencana pembangunan di lahan pertanian milik mereka. Masyarakat menilai bahwa dibalik kehendak baik pemerintah, namun akan mengakibatkan (a) terdapat memarjinalisasi yang dapat

mengancam tatanan sosial budaya serta keberlangsungan hidup mereka.

(b) bentuk upaya perampasan ruang hidup, karena pembangunan mega proyek infrastruktur waduk ini akan menenggelamkan lahan produktif dan perkampungan mereka. Timbulnya perlawanan masyarakat terkait dengan pembangunan waduk Lambo karena tanah atau lahan yang digunakan dalam pembangunan waduk tersebut berstatus tanah ulayat yang kepemilikannya secara komunal.

Resistensi yang dilakukan masyarakat Adat yang terdampak terhadap rencana pembangunan waduk Lambo (a) masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Nagekeo pada tanggal 28 Oktober 2016, (b) masyarakat menghadang tim survei dari pemerintah kabupaten Nagekeo untuk tidak melakukan survei, dan (c) adanya aksi buka dada yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam menghadang tim survei. Di tahun 2016 terjadi peningkatan upaya penolakan. Bentuk resistensi yang dilakukan diantaranya penghadangan terhadap tim survei, pembakaran alat-alat survei dan pemukulan terhadap anggota satuan polisi pamong praja hingga berakhir pada litigasi. Diakhir tahun 2017 masyarakat melakukan penghadangan terhadap tim survei yang akan melakukan pengukuran dengan aksi telanjang dada yang dilakukan oleh sekelompok wanita dari dusun Malapoma. Selain melakukan tindakan fisik, kelompok adat masyarakat Lambo menentang rencana pembangunan dengan cara adat. Upacara adat ini melibatkan *Mosa Laki*, yang merupakan tokoh adat atau elit lokal, untuk meminta perlindungan leluhur mereka. Komunikasi ritual

dilakukan melalui upacara *fani* sebagai bentuk protes terhadap pembongkaran rumah jaga adat di lokasi pembangunan. Sebagai fasilitator rencana pembangunan, pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai cara, terutama kepada masyarakat di desa Rendu Butowe, yang paling banyak menuai penolakan. beberapa metode digunakan untuk memberi pemahaman mengenai pentingnya pembangunan Waduk Lambo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) diperuntukan di NTT adalah pembangunan waduk Lambo untuk mengurangi masalah ketersediaan air bersih. Ini didasarkan pada rencana pembangunan yang akan memanfaatkan lahan seluas 512 hektar. Dalam pembangunan tersebut berdampak di tiga desa, Desa Rendu Butowe, Desa Labolewa, dan Desa Ulupulu, termasuk dalam tiga wilayah kecamatan: Desa Rendu Butowe berada di wilayah Aesesa Selatan, Desa Ulupulu berada di wilayah Nangaroro, dan Desa Labolewa berada di wilayah Aesesa. Sebagai hasil survei tentang Rencana Tindakan Pembelian Tanah dan Pengembangan atau disebut *Land Aquisition and Resstlement Action Plan* (LARAP), waduk yang akan dibangun di Nagekeo akan berfungsi untuk: (a) meningkatkan intensitas tanam di daerah irigasi Mbay Kanan dan daerah irigasi Mbay Kiri; (b) menyediakan air untuk kota Mbay; (c) mengontrol banjir di kota Mbay dan daerah irigasi Mbay; dan (d) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya; (e) Mengembangkan objek pariwisata. Untuk itu

penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi proses eksklusi sosial masyarakat di ketiga desa tersebut dalam pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara negara untuk melancarkan pembangunan Waduk Lambo?
2. Bagaimana dinamika sosial warga lokal dalam menanggapi pembangunan waduk Lambo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsi dan menganalisis cara negara untuk melancarkan pembangunan waduk Lambo.
2. Mendeskripsi dan menganalisis dinamika sosial warga lokal dalam menanggapi pembangunan waduk Lambo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dan kajian teoritik tentang strategi Konflik Sosial baik secara Horizontal maupun Vertikal dalam pembangunan khususnya dalam menghadapi eksklusi sosial pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyebab berbagai bentuk eksklusi sosial sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi agar tidak terjadinya eksklusi sosial untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Sosial

Dalam bidang sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber belajar bagi publik khususnya yang tertarik dengan konflik pembangunan infrastruktur dan bagaimana organisasi pemerintah menerapkan strategi komunikasi pada situasi krisis serta mengatasi jika terjadinya eksklusi sosial pembangunan.